

BAB I

PENDAHULUAN

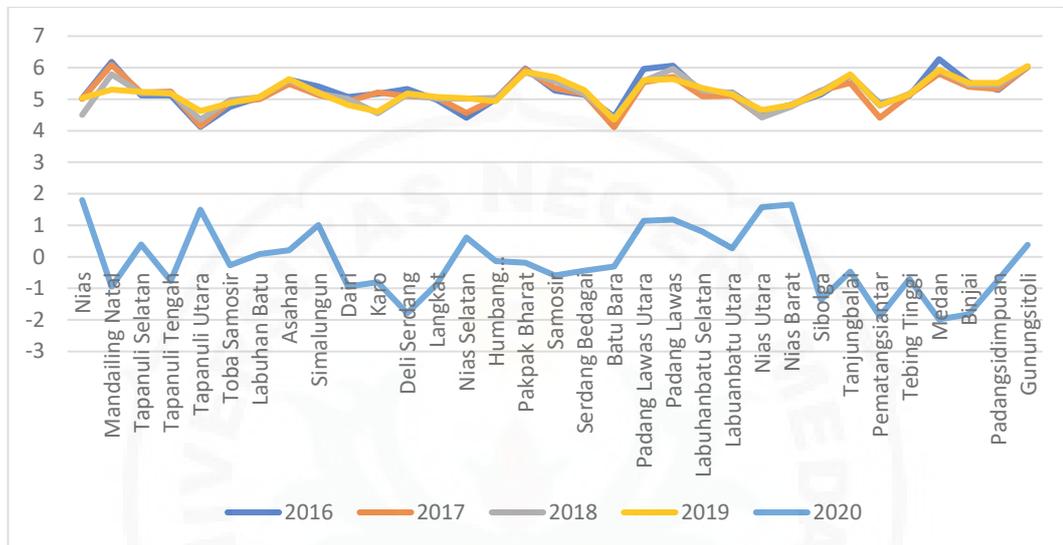
1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menganalisis hasil usaha pembangunan suatu negara atau daerah. Pembangunan ekonomi merupakan upaya perubahan struktural untuk meningkatkan produktifitas dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga akan tercapainya pemerataan pendapatan masyarakat. Serta tercapainya tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, kompetitif, maju, serta sejahtera. Dengan kata lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik berdampak terhadap kesuksesan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Jhingan (2018), ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup komponen ekonomi seperti sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja, dan skala produksi. Dan unsur non ekonomi seperti variabel manusia, politik, sosial, dan administrasi.

Produk Domestik Regional Bruto dapat mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai tambah dari semua komoditas dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota secara tahunan dihitung dengan menggunakan angka PDRB atas dasar harga konstan. Berikut ini adalah Perkembangan pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 diuraikan di bawah ini.



Sumber: BPS Sumatera Utara

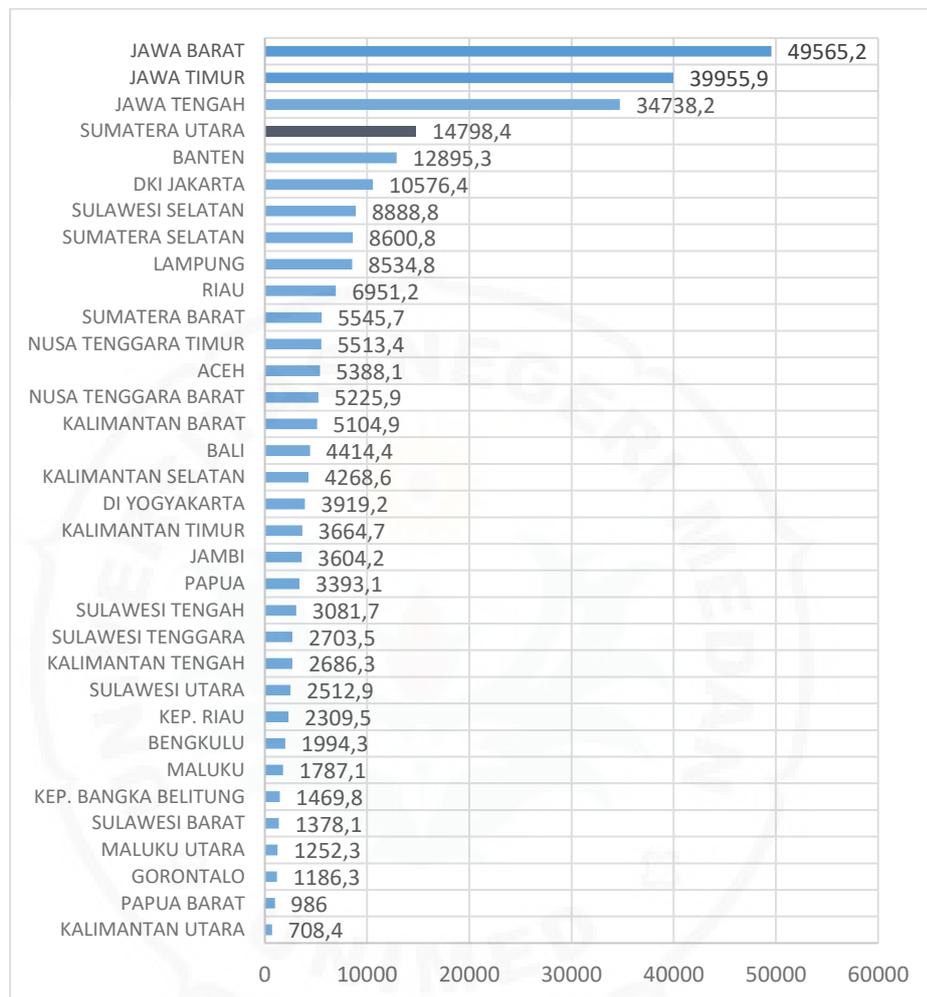
Gambar 1. 1 Perkembangan PDRB Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 – 2020 (%)

Gambar 1.1 menggambarkan adanya disparitas pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota Sumatera Utara juga mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan pada tahun 2020 terdapat Kabupaten/Kota yang mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu Humbang Hasundutan -0,13 persen , Pakpak Bharat -0,18 persen, Toba Samosir -0,27 persen, Batu Bara -0,31 persen, Serdang Bedagai -0,44 persen, Tanjung Balai -0,47 persen, Samosir -0,59 persen, Tebing Tinggi -0,70 persen, Padangsidempuan -0,73 persen, Tapanuli Tengah -0,76 persen, Karo -0,80 persen, Langkat -0,86 persen, Mandailing Natal dan Dairi -0,94 persen, Sibolga -1,36 persen, Deli Serdang -1,78 persen, Binjai -1,83 persen, Pematangsiantar -1,89 persen dan Medan

-1,98 persen . Dan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi antara tahun 2016 hingga 2020 adalah Kota Medan, yaitu sebesar 6,27 persen pada tahun 2016. Tertinggi selanjutnya adalah Mandailing Natal pada tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,18 persen dan 6,09 persen. Serta pertumbuhan ekonomi paling lambat ialah Kota Medan yaitu sebesar -1,98 persen pada tahun 2020.

Sumatera Utara yang padat penduduk memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terpadat keempat di Indonesia. Dilihat dari proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2020, seperti digambarkan pada grafik berikut:





Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2020

Pada gambar diatas dilihat bahwa Sumatera Utara merupakan provinsi terpadat keempat di Indonesia, setelah Jawa Barat 49.565,2 jiwa, Jawa Timur 39.959,9 jiwa, dan Jawa Tengah 34.738,2 jiwa.

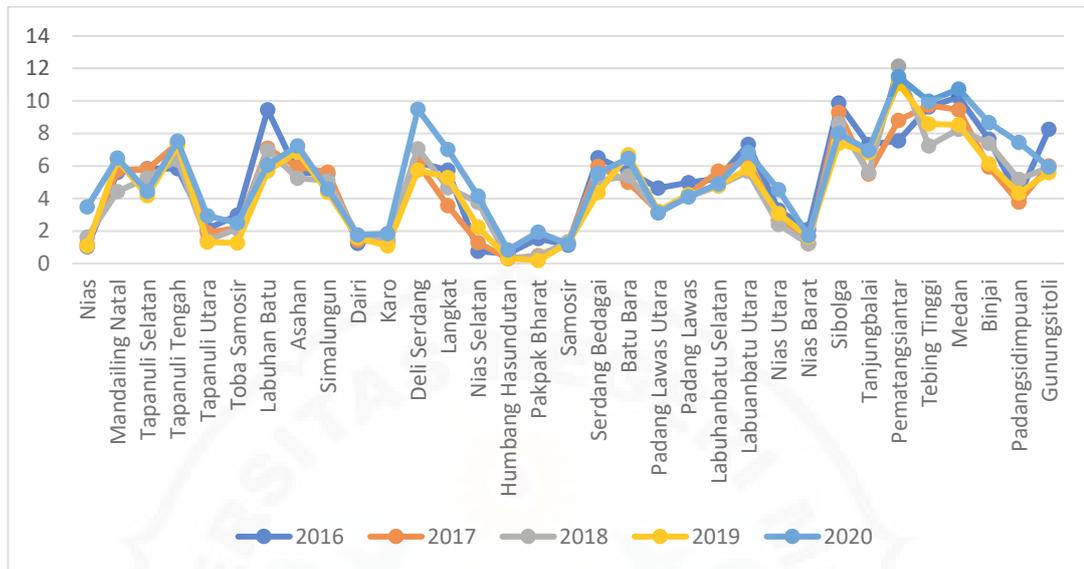
Pertimbangan demografis dipandang sebagai kekuatan pendorong untuk ekspansi ekonomi. Jika penduduk telah dipersiapkan secara memadai dalam hal kesehatan, pendidikan, pelatihan, lapangan kerja, dan investasi, hal ini akan berpengaruh pada produktivitas bangsa. Kualitas sumber daya manusia

mempengaruhi peningkatan keterampilan teknis, keahlian/pengetahuan, dan usaha kewirausahaan, dan secara efektif sumber daya manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam secara efisien.

Meskipun demikian, beberapa ekonom melihat peningkatan populasi sebagai hambatan untuk kemajuan wilayah. Hal ini juga ditegaskan oleh Mulyadi yang berpendapat bahwa penambahan penduduk yang tinggi di negara-negara berkembang akan menghambat proses pembangunan. Seiring dengan penambahan penduduk dari tahun ke tahun, bertambahnya jumlah pencari kerja dan akibatnya jumlah tenaga kerja juga meningkat. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam pasar kerja, mereka akan diklasifikasikan sebagai pengangguran.

Pengangguran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan seseorang yang tidak bekerja, mencari pekerjaan, menunggu proyek untuk pekerjaan berikutnya, atau mencari pekerjaan yang sangat baik. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut Hukum Okun, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran sangat terkait, inilah masalahnya. Dimana ekspansi ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan negatif. Akibatnya, peningkatan pengangguran berkorelasi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah Arsyad (2016: 360).

Dari tahun 2016 hingga 2020, grafik di bawah ini menggambarkan evolusi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber: BPS Sumatera Utara

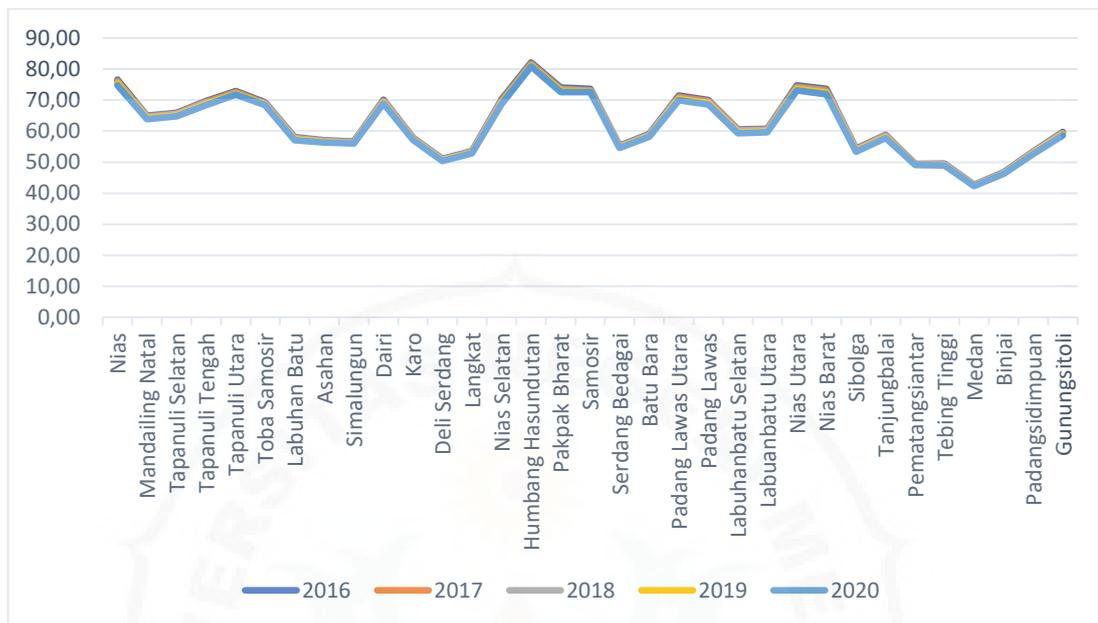
Gambar 1.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 – 2020 (%)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara berfluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pematang Siantar mengalami tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2018, dengan angka 12,14 persen. Kota Medan menyusul dengan persentase 10,24 persen yang terjadi pada tahun 2016. Wilayah dengan tingkat pengangguran terendah pada tahun 2019 adalah Kabupaten Pakpak Bharat, sebesar 0,19 persen.

Selain itu, pengangguran berpengaruh terhadap penurunan pendapatan masyarakat, sehingga mengurangi kesejahteraan masyarakat. Timbulnya kemiskinan berbanding lurus dengan jumlah kesejahteraan masyarakat. Seringkali, pengangguran hidup berdampingan dengan kemiskinan. Masalahnya berkaitan dengan kualitas penduduk. Jika penduduk menganggur maka ia tidak mempunyai pendapatan, sehingga penduduk tersebut pada akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Saat kebutuhan tidak terpenuhi maka penduduk tersebut akan

terjebak kedalam lingkaran kemiskinan. Jika tidak dilakukan penganggulan kemiskinan maka akan terjadi peningkatan jumlah penganggura. Selain itu terjadi peningkatan jumlah kematian akibat masyarakat yang kelaparan, putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan, dan tindakan kejahatan yang meningkat karena masyarakat terdesak untuk memperoleh pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Keadaan padat penduduk di Sumatera Utara tidak menutup kemungkinan akan terjadinya fenomena baru yaitu bonus demografi. Bonus demografi yaitu adanya peningkatan komponen penduduk usia produktif yang memiliki kontribusi dalam pembangunan. Dengan kata lain, bonus demografi merupakan konsekuensi dari perubahan struktur penduduk di suatu wilayah padat karya. Keuntungan demografis diungkapkan oleh rasio ketergantungan. Menurut Arsyad (2016:339), rasio ketergantungan juga dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan ekonomi suatu negara, terlepas dari klasifikasinya sebagai negara maju atau berkembang. Selain itu, rasio dependen adalah indikator demografis yang signifikan. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar ketergantungan penduduk usia produktif terhadap penduduk tidak produktif untuk dukungan, dan sebaliknya. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai insentif demografi untuk periode 2016-2020. Lebih lanjut akan dirinci lebih dalam pada grafik berikut ini.



Sumber : BPS Sumatera Utara

Gambar 1.4 Perekmbangan Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 – 2020 (%)

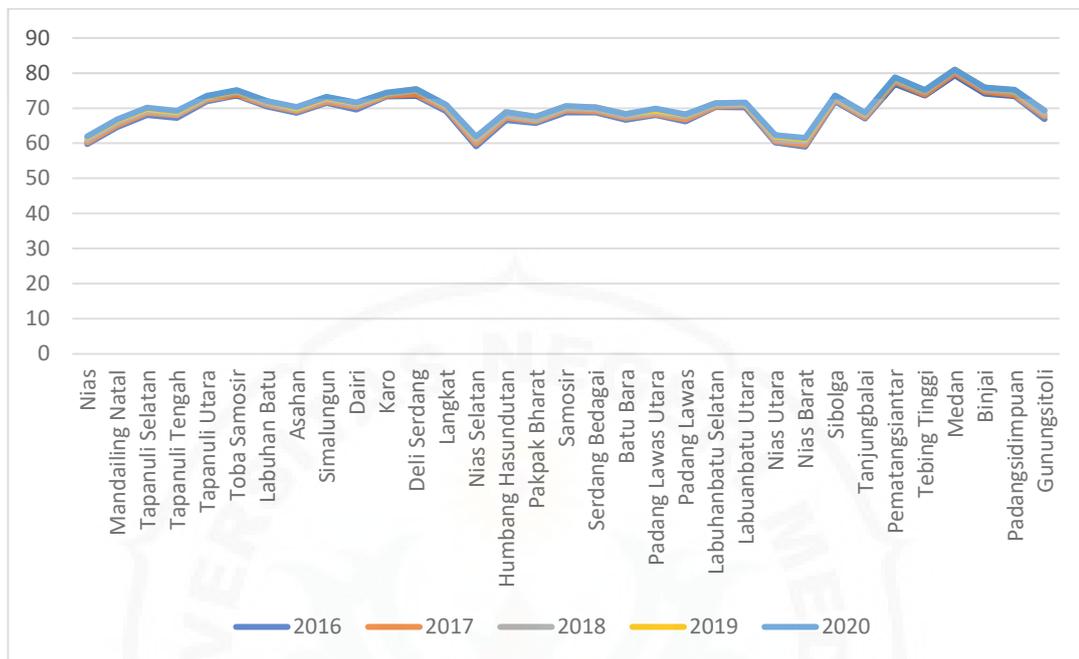
Gambar 1.4 menunjukkan bahwa rasio beban ketergantungan di Provinsi Sumatera Utara menurun dari tahun 2010 – 2020. Adapun Kabupaten/Kota yang memiliki persentase rasio beban ketergantungan yang tinggi yaitu Kabupaten Humbang Hasudutan yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 82,11 persen dan Kabupaten Nias pada tahun 2016 sebesar 76,61 persen. Dan persentase rasio beban ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2020 di Kota Medan sebesar 42,30 persen. Dari penurunan ini memberikan jendela peluang di Provinsi Sumatera Utara. Bonus Demografi memiliki karakteristik baik dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan demografis dapat menjadi peluang sekaligus risiko bagi bangsa. Jika kita bisa memaksimalkan kejadian ini untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, kita punya peluang. Atau, jika pemerintah mengabaikan kesempatan ini, itu akan menjadi ancaman dan tanggung jawab masa depan bangsa.

Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, kualitas penduduk dapat dinilai (HDI). Sejak tahun 1990, UNDP secara berkala merilis Human Growth Index (HDI) sebagai ukuran kuantitatif pembangunan manusia. Dimana pembangunan manusia merupakan upaya untuk mengembangkan potensi manusia dengan menumbuhkan tingkat kesehatan dan pendidikan, sehingga setiap penduduk memiliki kesempatan untuk hidup lebih sehat, lebih kreatif, dan lebih produktif (Anggraini 2018:28).

Human Development Index (HDI) merupakan jawaban United Nations Development Programme (UNDP) atas tuntutan indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu negara (daerah) telah memanfaatkan sumber daya penduduknya untuk meningkatkan kualitas keberadaan manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, muncul konsep bahwa kualitas hidup manusia merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa. Menurut Sun'an & Senuk (2015: 108), manfaat modal manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, terutama bagaimana modal manusia membantu mendorong produktivitas, serta fleksibilitas dan alokasi yang efisien. Ini konsisten dengan pendapat Adam Smith dan ekonom abad ke-18 bahwa produktivitas pekerja berkontribusi pada penciptaan surplus kekayaan.

Informasi berikut menggambarkan evolusi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016 hingga tahun 2020.



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1. 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 – 2020 (%)

Berdasarkan gambar 1.5 menunjukkan bahwa IPM berada pada kisaran 60 – 80 persen. Indeks Pembangunan Manusia yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara terletak pada status tinggi selama periode 2016 – 2020. Kabupaten/Kota dengan nilai IPM sebesar 80 persen atau lebih didominasi oleh Kota Medan yang terletak di Pantai Timur. Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias terletak di Pesisir Barat dan memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia rata-rata sebesar 66,77 persen. Perihal tersebut menampilkan kalau mutu indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut tergolong rendah. Adanya kesenjangan antar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara mempengaruhi kesejahteraan suatu daerah. Kabupaten yang memiliki IPM terendah ialah Nias Barat dengan nilai IPM sebesar 59,03 persen.

Sebab nilai tersebut berstatus rendah karena nilainya dibawah 70 persen. Rendahnya IPM di Kabupaten Nias menunjukkan jika sarana prasarana pendidikan serta kesehatan belum memadai. Sehingga mutu sumberdaya manusia yang dimiliki berbeda dengan Kawasan Pantai Timur yang memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Keberhasilan suatu daerah bisa diketahui dari beberapa indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, rasio ketergantungan, indeks pembangunan manusia, dan rasio ketergantungan. Untuk mencapai pembangunan, setiap daerah berupaya mengurangi pengangguran dan rasio ketergantungan dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi serta upaya tingkatkan mutu sumber daya manusia dengan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Terjadinya bonus demografi di Provinsi Sumatera Utara diikuti dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Sumatera Utara mungkin dapat memanfaatkan manfaat demografis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran di provinsi tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat menurunkan tingkat pengangguran. Jika pengangguran berkurang, kemiskinan dapat dihilangkan dan distribusi pendapatan serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan jumlah penduduk Sumatera Utara saat ini. Sumber daya manusia harus memiliki kapasitas dan keterampilan untuk mendongkrak produksi

barang dan jasa agar bonus demografi menjadi peluang akselerasi pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan modal manusia.

Atas dasar suksesi empiris, teoritis, dan peristiwa yang diamati, para sarjana tertarik untuk melakukan studi tentang “Pengaruh Bonus Demografi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi isu-isu berikut yang terjadi di Sumatera Utara, berdasarkan deskripsi konteks latar belakang masalah:

1. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang dilihat dari PDRB Harga Konstan yang mengalami fluktuasi. Dan di tahun 2020 PDRB Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan.
2. Pengangguran di Sumatera Utara yang mengalami fluktuasi. Namun mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2020.
3. Beban ketergantungan yang mengalami penurunan yang lambat.
4. Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara yang mengalami peningkatan yang lambat dari tahun ketahun.

1.3 Pembatasan Masalah

Luasnya ruang lingkup penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Variabel Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi digunakan dalam analisis ini.

2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian ini eksklusif untuk Provinsi Sumatera Utara.
3. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu empat tahun (2017-2020).

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan konteks dan deskripsi sebelumnya, masalah penelitian berikut akan diperiksa:

1. Apakah Bonus Demografi berpengaruh secara langsung terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara langsung terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Bonus Demografi berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?
5. Apakah Pengangguran berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?
6. Apakah Bonus Demografi berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?
7. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menguji hubungan langsung pengaruh Bonus Demografi terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menguji hubungan langsung antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menguji hubungan langsung pengaruh Bonus Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menguji dampak langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
5. Untuk menguji hubungan langsung pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
6. Untuk menguji pengaruh tidak langsung antara Bonus Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara melalui Pengangguran.
7. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikirnya tentang penerapan teori pada objek penelitiannya.

2. Bagi masyarakat hasil riset ini dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran yang bermanfaat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh Bonus Demografi dan IPM terhadap Pengangguran Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan dapat dijadikan referensi untuk masyarakat yang membutuhkan.
3. Bagi pemerintah hasil riset diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna tentang kondisi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.